

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasa Teori

2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

Di Indonesia, selain terdapat standar akuntansi keuangan (SAK) juga terdapat standar akuntansi pemerintah (SAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar akuntansi adalah acuan dalam penyajian keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak di luar organisasi otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi berterima umum (Halim, 2014). Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 yang mengamanatkan pemerintah paling lambat sudah menerapkan akuntansi Akrual (*accrualbased accounting*) pada tahun 2008. Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual Basis*) menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) 24 tahun 2005 Tentang standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan keluar PP 24 tahun 2005, pemerintah menggunakan basis kas menuju akrual.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, “standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 64 Tahun 2013 “SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran”. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

2.1.1.1 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Menurut SAP

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 yaitu:

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-laporan operasional (LO), beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka laporan realisasi anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah.

b. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban pada masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal yang tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat laporan realisasi anggaran masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

- d. **Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)**
 Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.
- e. **Periodisitas (*Periodicity*)**
 Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.
- f. **Konsistensi (*Consistency*)**
 Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
 Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- g. **Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)**
 Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
- h. **Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)**
 Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

2.1.1.2 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akuntansi, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban,

dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menjadikan laporan demikian.

Basis Akrual untuk pendapatan-LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, namun sebaliknya apabila anggaran disusun berdasarkan basis akrual maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat berdasarkan pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. (PP 71 tahun 2010)

2.1.1.3 Akuntansi Berbasis Akrual

Menurut PP No.71 tahun 2010

“Basis Akuntansi Akrual, yaitu yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan financial dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar”

Menurut KSAP (2016:3)

“Akuntansi berbasis Akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa melihat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan”

Menurut Erlian dan Rasdianto (2012:10)

“Akuntansi Berbasis Akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadinya atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengakuan sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas “

Dari pengertian akuntansi basis akrual diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi basis akrual merupakan basis akuntansi dimana hak atau kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya diakui pada saat terjadinya peristiwa, tanpa melihat apakah kas atau setara kas diterima atau di bayarkan. Selain itu basis akrual dapat memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas.

Pada akuntansi berbasis akrual ini, ada beberapa isu perubahan yang perlu dipahami sebagai berikut :

- a. Laporan keuangan menurut (PP No 24 Tahun 2005)
 1. Laporan Realisasi Anggaran
 2. Neraca
 3. Laporan Arus Kas
 4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Sedangkan pada SAP yang baru (PP No.71 Tahun 2010) komponen laporan keuangannya sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

- b. Hubungan antar pelaporan keuangan

1. Laporan Financial

Laporan Operasional (LO) akan menghasilkan Surplus/Defisit-Lo, kemudian Surplus /Defisit-Lo tersebut akan di lampirkan kembali dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagai penambah ekuitas

awal dan akan menghasilkan ekuitas akhir dalam Laporan LPE, selanjutnya Ekuitas Akhir tersebut akan di masukan kembali pada Laporan Neraca.

2. Laporan Pelaksanaan Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran akan di terima Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(SILPA) / Sisa Kurang Pembiayaan Anggara (SIKPA) untuk tahun berjalan yang akan di masukan ke dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagai penambahan saldo awal SAL tahun berjalan.

- c. Basis pencatatan yang digunakan pada SAP lama adalah kas menuju akrual, Sedangkan pada SAP yang baru yaitu basis akrual
- d. Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, pemerintah tetap menggunakan basis kas, sedangkan penyusunan Neraca dan Laporan Operasional menggunakan basis akrual.

2.1.1.3.1 Kelebihan dan Kekurangan Akuntansi Berbasis Akrual

Menurut Bastian (2010:118-119) menyatakan bahwa kelebihan dan kekurangan akuntansi berbasis akrual sebagai berikut :

a. Kelebihan Akuntansi Berbasis Akrual

1. Penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional behubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti bahwa basis akrual memebrikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan diperoleh.
2. Basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan, perubahan harga, pendapatan yang diperoleh alam basis akrual, dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima.
3. Basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal.

b. Kekurangan Akuntansi Berbasis Akrual

1. Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat
2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi
3. Dalam perbandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal.

4. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.

Perbedaan Komponen laporan Keuangan antara PP 24/2005 dengan PP 71/2010 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tabel Perbandingan PP 21/2005 dan PP 71/2010

PP No. 24 Tahun 2005	PP No.71 Tahun 2010
Komponen Laporan keuangan : 1. Neraca 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 3. Laporan Arus Kas (LAK) 4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Laporan yang bersifat optional : 1. Laporan Kinerja Keuangan (LKK) 2. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Komponen Laporan Keuangan pokok: A. Laporan Pelaksanaan Anggaran : 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) B. Laporan Financial : 1. Neraca 2. Laporan Operasional (LO) 3. Laporan Arus Kas (LAK) 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) C. Catatan Atas Laporan Keuangan 1. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

2.1.1.3.2 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua terdiri dari 13 pernyataan yang masing-masing menjelaskan tentang ketentuan dari masing-masing pernyataan yang terdiri dari :

1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran
3. PSAP 03 Laporan Arus Kas
4. PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
5. PSAP 05 Akuntansi Persediaan
6. PSAP 06 Akuntansi Investasi
7. PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
8. PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
9. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
10. PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi
11. PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi

12. PSAP 12 Laporan Operasional
13. PSAP 13 Badan Layanan Umum (BLU)

2.1.1.3.3 Penerapan SAP Berbasis Akruwal

Menurut PP 71 tahun 2010 tentang pernyataan standar akuntansi pemerintah (SAP) Berbasis Akruwal dalam penerapan SAP berbasis Akruwal mencakup beberapa hal sebagai berikut

1. SAP berbasis Akruwal untuk mengakui pendapatan-LO, Beban, Utang, dan Ekuitas dalam Pelaporan Financial
2. Pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar
3. Pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah dipenuhi walaupun kas atau setara kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah
4. Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas atau setara kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah
5. Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi Berbasis Akruwal
6. Penyajian Laporan Keuangan telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

2.1.2 Kompetensi Aparatur Pemerintah daerah

Menurut Moehariono (2009:4)

“Kompetensi merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu”.

Sumber Daya Manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, Warisno (2014). Seseorang yang memiliki kompetensi

akan bekerja dengan pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Skill adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. Skill seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.

Menurut Gordon dikutip dalam Sutrisno (2011:204) ada aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan (*Knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan/pemerintahan
2. Pemahaman (*Understanding*), yaitu kedalaman kognitif, dan efektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi kerja secara efektif dan efisien.
3. Nilai (*Value*), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku para karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain)
4. Kemampuan (*Skill*), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan.
5. Sikap (*Attitude*), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji.
6. Minat (*Interest*), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya melakukan suatu aktivitas kerja.

Sumber daya manusia merupakan hal yang penting yang harus dilihat dalam instansi. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia maka harus diadakan pembinaan, pembinaan SDM bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang

disiplin, professional, berkualitas tinggi, produktif untuk mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien. Kemampuan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat penting arti dan keberadaannya untuk peningkatan produktifitas kerja dilingkungan organisasi. Manusia merupakan unsur penting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan dari mengembangkan misinya. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama dan penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi, dan tujuannya. Sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Apabila dalam organisasi setiap individu bekerja dengan baik, berprestasi, bersemangat, dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisasi, maka kinerja organisasi secara keseluruhan akan baik.

2.1.3 Komitmen Organisasi

Menurut Gibson (2012:182)

“Komitmen organisasional merupakan perasaan identifikasi, loyalitas dan pelibatan dinyatakan oleh pekerja terhadap organisasi atau unit dalam organisasi”

Menurut Luthans (2012:249)

“Komitmen organisasional adalah sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan”

Menurut Cut Zулnali (2010:127)

“Komitmen organisasional adalah sebuah keadaan psikologi yang mengkarakteristikan hubungan karyawan dengan organisasi atau implikasinya yang mempengaruhi apakah karyawan akan tetap bertahan

dalam organisasi atau tidak, yang teridentifikasi dalam tiga komponen yaitu komitmen efektif, komitmen kontnyu, dan komitmen normatif”

Menurut Moerhead dan Griffin (2013:73)

“Komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya”

Menurut Kreitner dan Kinicki (2014:165)

“Komitmen Organisasi sebagai tingkatan dimana seseorang mengenali sebuah organisasi dan terikat pada tujuan-tujuannya”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu keadaan dimana suatu individu memiliki dorongan atau keinginan untuk tetap berada di dalam suatu organisasi dan percaya pada nilai-nilai organisasi. Model proses komitmen secara konseptual dibedakan menjadi tiga tahap sebagai berikut:

1. *Organizational entry*, berkaitan dengan pemilihan karyawan akan organisasi yang akan dimasuki. Dengan demikian akan mencakup kesesuaian karir individu dalam organisasi. Pada tahap ini sebenarnya pemilihan terjadi pada kedua belah pihak, yaitu karyawan memilih organisasi yang akan dimasukinya, sedang organisasi memilih karyawan yang akan dipekerjakan.
2. *Organizational commitment*, merupakan tahap dimana karyawan menetapkan kedalaman organisasi ini pada kedalaman identifikasi karyawan dengan tujuan-tujuan organisasi dan keinginan untuk bekerja keras dalam mempertahankan misi organisasi. Pada tahap ini dapat dilihat bagaimana komitmen seorang karyawan, yaitu apakah komitmen organisasinya rendah atau tinggi. Yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah kemungkinan terjadinya karyawan dengan komitmen organisasi tinggi berubah menjadi rendah.
3. *Propensity*, merupakan bagaimana kecenderungan untuk karyawan dengan komitmen organisasi rendah akan terdapat kecenderungan

yang besar untuk keluar organisasi. Apabila tidak demikian dapat dilihat bahwa karyawan ini mempunyai tingkat absensi tinggi, demikian juga kinerja (performance) relative rendah. Sedangkan pada karyawan dengan komitmen tinggi, kecenderungannya adalah tetap bergabung dengan organisasi. Karyawan ini pada umumnya juga menunjukkan tingkat partisipasi terhadap organisasi yang besar.

2.1.4 Sarana Prasarana

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan”. Sedangkan Prasarana menurut KBBI adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Sarana prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Alfonsus dkk (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sarana prasarana pada khususnya komputer, printer, dan software sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

2.1.5 Teknologi Informasi

Menurut Darmawan (2014:16), secara sederhana teknologi informasi dapat dikatakan sebagai ilmu yang diperlukan untuk mengelola informasi agar informasi tersebut dapat dicari dengan mudah dan akurat. Isi dari ilmu tersebut merupakan teknik-teknik dan prosedur untuk menyimpan informasi secara efisien dan efektif. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil besar terhadap perubahan-perubahan mendasar pada struktur, operasi dan manajemen organisasi

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses

pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, Sistem Akuntansi Pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Untuk itu, dibutuhkan teknologi informasi untuk membantu sistem akuntansi pemerintahan agar dapat berjalan dengan lancar. Menurut Aldiani (2010) perangkat pendukung yang memberikan sarana kepada penyusun laporan keuangan pemerintah daerah dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu:

1. Perangkat keras Perangkat keras (*hardware*) adalah perangkat yang berwujud fisik dan kasat mata. Terdiri dari *Central Processing Unit (CPU)*, peralatan *input*, peralatan *output*, dan kombinasi *input,output*. Menurut Mulyono dalam Aldiani dalam Gabriella Ara Advantana(2014) perangkat keras adalah peralatan komputer yang dapat dilihat oleh mata atau diraba.
2. Perangkat lunak
Perangkat lunak (*software*) meliputi perintah-perintah yang berisi programserta data yang melengkapi dan juga mempunyai tugas yang menghubungkan manusia dengan perangkat kerasnya (Mulyono dalam Advantana (2014). Perangkat lunak dapat dikelompokkan menjadi:
 - a. Program komputer digunakan untuk memerintah komputer melaksanakan langkah –langkah yang tertulis diprogram,

- b. Dokumentasi adalah catatan-catatan yang digunakan untuk menjelaskan langkah atau prosedur program tersebut, dan semua catatan yang berkaitan dengan proses data tersebut.

Sebagai wujud pertanggungjawaban Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) selaku pegawai akuntabilitas keuangan nasional kembali meluncurkan satu aplikasi terbaru yaitu aplikasi Sistem Akuntansi Informasi Berbasis Akru (SAIBA) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan sekaligus menjadi solusi untuk menghindari adanya kecurangan. Oleh sebab itu dengan adanya aplikasi yang mendukung dalam proses penyusunan laporan keuangan, maka akan lebih memudahkan pemerintah dalam menentukan tingkat keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rian Fitrizal (2017). Skripsi. Universitas Negeri Padang	Pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem informasi dan komitmen organisasi terhadap implementasi SAP Berbasis Akru	$X_1 = \text{SDM}$ $X_2 = \text{Sistem Informasi}$ $X_3 = \text{Komitmen organisasi}$ $Y = \text{Implementasi SAP berbasis akrual}$	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sistem informasi dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual
2	Ida Bagus Gede Bayu Permana dan Dewa Nyoman Wratmaja(2016). Skripsi. Universitas Udayana (Unud), Bali.	Pengaruh SDM, Komitmen organisasi, sistem informasi pada kesiapan penerapan laporan keuangan daerah berbasis akrual	$X_1 = \text{SDM}$ $X_2 = \text{Komitmen organisasi}$ $X_3 = \text{Teknologi Informasi}$ $Y = \text{Kesiapan penerapan akuntansi berbasis akrual}$	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi dan sistem informasi berpengaruh positif signifikan pada kesiapan penerapan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual

3	Gabriel Ara Adventana dan Ch. Heni Kurniawan (2013). Skripsi. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah Provinsi DIY dalam implementasi standar akuntansi berbasis akrual menurut PP 71 tahun 2010	X ₁ = SDM X ₂ = Komitmen Organisasi X ₃ = Teknologi Informasi dan Komunikasi Y = Kesiapan penerapan SAP berbasis akrual	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SDM, komitmen organisasi, teknologi informasi dan komunikasi secara simultan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Variabel SDM dan komitmen organisasi secara parsial berpengaruh positif signifikan, tetapi teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan akuntansi berbasis akrual
4	Evita dkk (2016). Skripsi. Universitas Padjadjaran.	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan teknologi informasi terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual	X ₁ = Kompetensi SDM X ₂ = Komitmen Organisasi X ₃ = Teknologi Informasi dan Komunikasi Y = Penerapan akuntansi berbasis akrual	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual
5	Alfonsus Janton (2018). Skripsi. Universitas Brawijaya	Pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi dan sarana prasarana	X ₁ = Kompetensi SDM X ₂ = Komitmen Organisasi X ₃ = Sarana Prasarana Y = Penerapan akuntansi berbasis akrual	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan sarana prasarana berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis

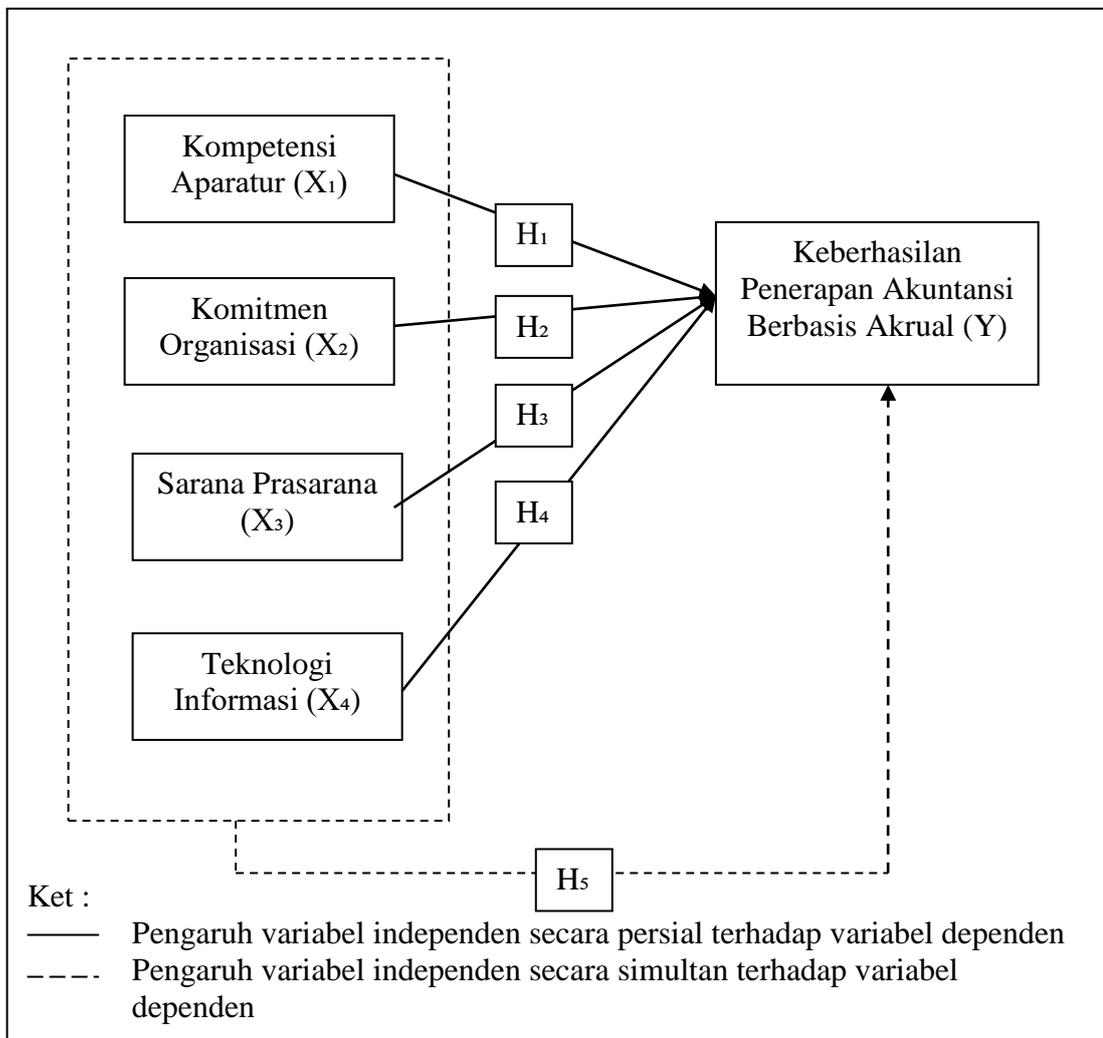
Sumber : Diolah oleh Peneliti 2019

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011:60)

“Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting”

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:99), menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual

Kompetensi menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas profesional dalam pekerjaan mereka (Panggabeyan, 2013). Sumber daya manusia yang kompeten sangat diperlukan dalam menyiapkan dan menyusun laporan keuangan. Kebeutuhan tersebut sangat terasa ketika pada masa awal penerapan akuntansi berbasis akrual (Simanjuntak, 2010).

Surdiyanti dan herningsih (2014) , menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian Surepno (2016), yang menyatakan bahwa sumber daya manusia menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H₁ : Kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual

2. Pengaruh komitmen organisasi terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual

Komitmen organisasi merupakan dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi (Luthans dalam Aldiani, 2010). Pegawai yang memiliki komitmen yang kuat akan bekerja dengan maksimal agar organisasi tempat mereka bekerja dapat mencapai keberhasilan. Jika pegawai berkeyakinan bahwa visi dan misi organisasi akan tercapai dengan sumbangsi mereka, situasi kerja yang bersinergi akan tercipta dan menyebabkan peningkatan kinerja. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Indah (2008), Noch (2006), Aldiani (2010), Damanik (2011), Adventana dan Kurniawan (2013), Pratiwi, dkk (2013)

tetapi tidak menurut Ardiansyah (2013). Berdasarkan uraian tersebut peneliti menduga hipotesa sebagai berikut

H₂ : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual

3. Pengaruh sarana prasarana terhadap keberhasilan penenrapan akuntansi berbasis akrual

Sarana prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Nugraihni, dkk (2008) menunjukkan bahwa sarana prasarana pada khususnya komputer, printer, dan software sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Temuan ini didukung oleh penelitian Indah, (2008), Aldiani (2010), Damanik (2011), Rahmayanti (2012), dan Kusuma (2013). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesa sebagai berikut:

H₃ : Sarana prasarana berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual.

4. Pengaruh teknologi informasi terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual

Teknologi informasi merupakan suatu media yang digunakan untuk mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan. Dalam penelitian Usman (2014), ditemukan bahwa dalam sektor swasta, inefisiensi sistem informasi dan keterbatasan data, seperti kemampuan sistem informasi dalam menyediakan data merupakan hambatan dalam pelaksanaan dan kegunaan sistem manajemen akuntansi.

Krumwiede dalam Usman, dkk (2014), menunjukan bahwa organisasi dengan teknologi informasi yang lebih maju mungkin lebih dapat menerapkan sistem akuntansi manajemen baru daripada organisasi dengan sistem informasi yang kurang canggih karena biaya pengolahan dan pengukuran yang lebih rendah.

Hasil temuan dari penelitian yang dilakukan Sari, dkk (2016) menunjukan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif pada penerapan akuntansi berbasis

akrual. Hal ini sejalan dengan penelitian Surepno (2015) yang menyatakan bahwa sistem dan prosedur akuntansi menjadi salah satu sarana pendukung dalam implementasi akuntansi berbasis akrual.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₄ : Teknologi informasi berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual

5. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Komitmen Organisasi, Sarana Prasarana, dan Teknologi Informasi Terhadap Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

Berdasarkan dugaan seluruh hipotesis secara persial berpengaruh positif, maka dapat dikatakan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh secara bersama-sama akan berpengaruh terhadap variabel dependen yang dapat dihipotesakan sabagai berikut :

H₅ : Kompetensi aparatur pemerintah daerah, komitmen organisasi, sarana prasarana, dan teknologi informasi berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual.